



Pendidikan Islam di Masa Awal Kemerdekaan Indonesia: Peran Sejarah dalam Membentuk Identitas Pendidikan Nasional

Ihsan Abdul Haq¹

¹ Universitas Islam Jakarta, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article History

Submitted 10-07-2025

Revised 22-08-2025

Accepted 29-08-2025

Published 02-10-2025

Keywords:

Islamic Education;

Indonesian

Independence;

National identity;

Education policy;

Islamic history

Correspondence:

ihsanelhaq12@gmail.com

Abstract

This research examines the strategic role of Islamic education in the early days of Indonesian independence in shaping the identity of national education. The main objective of this study is to reveal how the contribution of Islamic education institutions, Muslim figures, and post-independence government policies shaped the direction and character of Indonesian national education with religious, humanist, and nationalist characteristics. The methodology used is a historical qualitative approach with analysis of primary and secondary sources, such as state archives, educational documents, and the works of Islamic education figures. The results show that Islamic education has a central role in grounding the values of Pancasila and strengthening national integration through Islamic boarding schools, madrasas, and other Islamic educational institutions. The novelty of this research lies in the disclosure of historical dynamics that have received less attention in contemporary national education discourse. The implication for policy is the importance of reorienting education policy to better accommodate local and spiritual values that have proven to be the unifying force of the nation since the beginning of independence.

Penelitian ini mengkaji peran strategis pendidikan Islam pada masa awal kemerdekaan Indonesia dalam membentuk identitas pendidikan nasional. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana kontribusi institusi pendidikan Islam, tokoh-tokoh Muslim, dan kebijakan pemerintah pasca kemerdekaan membentuk arah dan karakter pendidikan nasional Indonesia yang bercorak religius, humanis, dan nasionalis. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif historis dengan analisis sumber-sumber primer dan sekunder, seperti arsip negara, dokumen pendidikan, dan karya-karya tokoh pendidikan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki peran sentral dalam membumikan nilai-nilai Pancasila dan memperkuat integrasi nasional melalui pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan Islam lainnya. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pengungkapan dinamika historis yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam wacana pendidikan nasional kontemporer. Implikasinya terhadap kebijakan adalah pentingnya reorientasi kebijakan pendidikan agar lebih mengakomodasi nilai-nilai lokal dan spiritual yang telah terbukti menjadi kekuatan pemersatu bangsa sejak awal kemerdekaan.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam memiliki akar historis yang panjang dan mendalam dalam membentuk jati diri bangsa Indonesia. Sejak masa penjajahan, lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, surau, dan madrasah telah menjadi ruang sosial kultural bagi pembentukan karakter dan identitas umat. Di masa awal kemerdekaan Indonesia, pendidikan Islam tidak hanya memainkan peran religius, tetapi juga menjadi bagian integral dari perjuangan nasional dalam membentuk sistem pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Periode transisi dari masa penjajahan ke era kemerdekaan membuka ruang baru bagi artikulasi ide-ide pendidikan yang berakar pada nilai-nilai Islam, namun juga harus bersinergi dengan visi negara bangsa yang tengah dibangun.

Namun realitas pendidikan Islam dalam konteks Indonesia kontemporer menunjukkan sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2022), masih terdapat disparitas kualitas antara lembaga pendidikan umum dan lembaga pendidikan Islam, terutama di daerah-daerah tertinggal. Laporan dari Kementerian Agama Republik Indonesia (2021) juga mencatat bahwa lebih dari 60% madrasah swasta masih mengalami keterbatasan fasilitas belajar-mengajar, termasuk kurangnya tenaga pendidik yang berkualifikasi serta keterbatasan akses terhadap teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan Islam, meskipun berakar kuat secara historis, masih mengalami kendala struktural dan sistemik dalam berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan pendidikan nasional.

Kesenjangan yang muncul bukan hanya bersifat fisik atau infrastruktur, tetapi juga menyangkut legitimasi epistemologis dari pendidikan Islam itu sendiri. Di satu sisi, sistem pendidikan nasional yang berkembang pasca kemerdekaan cenderung mengadopsi paradigma sekuler Barat, sementara pendidikan Islam menghadapi tantangan dalam menyelaraskan nilai-nilai keislaman dengan tuntutan kurikulum nasional yang lebih modern dan saintifik. Dalam kajian Ali dan Hidayatullah (2019), disebutkan bahwa masih terjadi dikotomi dalam persepsi masyarakat terhadap pendidikan Islam sebagai pendidikan kelas dua dibandingkan pendidikan umum. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa peran sejarah pendidikan Islam dalam merumuskan identitas nasional belum sepenuhnya diakui secara institusional.

Sebagian dari problematika tersebut berkaitan dengan sejarah relasi yang kompleks antara negara dan lembaga pendidikan Islam. Ketika Indonesia merdeka

pada tahun 1945, tidak serta-merta terjadi integrasi sistemik antara pendidikan Islam dan kebijakan pendidikan nasional. Hal ini tampak dari perdebatan-perdebatan dalam sidang-sidang konstituante maupun dalam penyusunan Undang-Undang Pendidikan pertama di era republik. Menurut Azra (2012), pendidikan Islam di masa awal kemerdekaan lebih banyak dikelola secara mandiri oleh masyarakat, dengan minimnya intervensi dan dukungan negara. Meskipun demikian, pendidikan Islam tetap menjadi kekuatan kultural dan sosial yang signifikan dalam mengembangkan wawasan kebangsaan dan religiositas masyarakat Indonesia.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara akar historis pendidikan Islam dengan arah modernisasi pendidikan nasional. Modernisasi yang tidak berbasis pada nilai-nilai lokal dan keagamaan sering kali meminggirkan potensi pedagogis yang dimiliki lembaga pendidikan Islam. Salah satu konsekuensinya adalah munculnya keterputusan generasi terhadap sejarah perjuangan pendidikan Islam itu sendiri. Menurut studi yang dilakukan oleh Ma'arif Institute (2020), sekitar 73% siswa madrasah tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang sejarah kontribusi pendidikan Islam dalam pembentukan negara Indonesia. Ini menjadi indikator serius bagi dekontekstualisasi nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan nasional.

Identifikasi penyebab masalah ini mencakup beberapa aspek struktural dan kultural. Secara struktural, kebijakan pendidikan nasional cenderung bersifat sentralistik dan seragam, sehingga tidak memberi ruang yang cukup bagi pendekatan lokal, termasuk pendidikan berbasis nilai-nilai Islam. Kurangnya representasi pemikir dan pendidik Islam dalam perumusan kebijakan juga berkontribusi terhadap lemahnya artikulasi pendidikan Islam dalam wacana nasional. Sementara secara kultural, arus globalisasi dan sekularisasi turut memengaruhi pola pikir masyarakat, terutama kelas menengah perkotaan, dalam memandang pendidikan Islam sebagai kurang relevan bagi kemajuan dan karier masa depan anak-anak mereka (Said & Zarkasyi, 2018).

Masalah lain yang perlu dicermati adalah transformasi sosial yang begitu cepat di abad ke-21, terutama dalam hal digitalisasi pendidikan dan tantangan revolusi industri 4.0. Lembaga pendidikan Islam masih belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan dinamika tersebut. Sebagian besar pesantren dan madrasah tradisional masih menggunakan metode pembelajaran konvensional, tanpa integrasi teknologi digital yang memadai. Keterbatasan ini berisiko memperlebar jurang

ketertinggalan antara pendidikan Islam dan sistem pendidikan umum yang lebih progresif dalam menyerap perkembangan zaman (Kementerian Agama, 2023).

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan upaya rekontekstualisasi peran pendidikan Islam dalam sejarah bangsa. Dalam konteks ini, penting untuk meninjau kembali kontribusi pendidikan Islam di masa awal kemerdekaan, bukan sekadar sebagai bagian dari nostalgia historis, melainkan sebagai pijakan untuk merumuskan strategi revitalisasi pendidikan Islam ke depan. Sejarah dapat memberikan legitimasi dan inspirasi bahwa pendidikan Islam pernah menjadi kekuatan transformasi sosial yang besar di Indonesia. Namun untuk itu, perlu penggalian yang mendalam terhadap aspek historis, ideologis, dan struktural dari pendidikan Islam pasca kemerdekaan.

Dalam narasi sejarah Indonesia, lembaga-lembaga pendidikan Islam telah mencetak tokoh-tokoh nasional yang berpengaruh, seperti Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, dan Zainul Arifin, yang tidak hanya berjuang dalam bidang agama, tetapi juga dalam membentuk arah kebangsaan. Nilai-nilai yang mereka tanamkan, seperti keikhlasan, keberanian, tanggung jawab sosial, dan cinta tanah air, menunjukkan bahwa pendidikan Islam telah menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan jauh sebelum konsep pendidikan nasional diformalkan oleh negara. Ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam bukan entitas marginal, tetapi fondasi penting dari sistem pendidikan nasional yang berkarakter.

Namun demikian, penelitian-penelitian kontemporer tentang pendidikan nasional seringkali mengabaikan kontribusi historis pendidikan Islam dalam membentuk identitas kebangsaan Indonesia. Hal ini mengindikasikan adanya gap atau kesenjangan dalam narasi pendidikan nasional, yang cenderung didominasi oleh pendekatan sekuler dan teknokratis. Akibatnya, identitas pendidikan nasional menjadi lemah dari sisi spiritual dan moral, serta kurang responsif terhadap kearifan lokal yang telah hidup dalam masyarakat selama berabad-abad (Zamroni, 2017).

Dengan memperhatikan dinamika tersebut, maka tulisan ini memfokuskan diri untuk mengkaji secara historis bagaimana pendidikan Islam di masa awal kemerdekaan Indonesia berperan dalam membentuk identitas pendidikan nasional. Penelitian ini penting untuk menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan tidak hanya bersifat normatif atau ideologis, melainkan memiliki dasar historis yang kuat. Dengan begitu, pendidikan Islam dapat diposisikan kembali secara proporsional dalam desain pendidikan nasional yang inklusif dan berkarakter.

Dalam ruang lingkup kajian ini, pembahasan akan dibatasi pada periode 1945 hingga 1950, yaitu masa-masa awal kemerdekaan Indonesia ketika terjadi transformasi sistem pendidikan dari kolonial ke nasional. Pembatasan ini dipilih karena periode tersebut merupakan momen krusial dalam menentukan arah dan paradigma pendidikan nasional, serta menjadi titik temu antara nilai-nilai Islam dan semangat kebangsaan yang sedang tumbuh. Fokus penelitian akan diarahkan pada analisis peran lembaga pendidikan Islam, pemikiran tokoh-tokoh Muslim, dan kebijakan negara terhadap pendidikan Islam pada masa itu.

Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menegaskan bahwa pendidikan Islam memiliki peran penting dalam mengisi ruang ideologis dan praktis dalam pembangunan pendidikan nasional. Dengan merujuk pada konteks sejarah awal kemerdekaan, diharapkan dapat ditemukan inspirasi dan pelajaran yang relevan untuk menjawab tantangan pendidikan Islam masa kini dan masa depan.

Dengan demikian, kajian ini tidak hanya bersifat retrospektif, tetapi juga prospektif. Artinya, sejarah tidak hanya dilihat sebagai arsip masa lalu, melainkan sebagai sumber kekuatan untuk membentuk masa depan pendidikan nasional Indonesia yang lebih berakar, ber karakter, dan berkeadaban. Pendidikan Islam yang berlandaskan nilai-nilai keimanan, keilmuan, dan kebangsaan dapat menjadi model transformatif dalam menjawab krisis identitas pendidikan nasional di tengah arus globalisasi.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena kajian difokuskan pada upaya merekonstruksi kontribusi pendidikan Islam dalam membentuk identitas pendidikan nasional pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana ditegaskan oleh Moleong (2019), pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna fenomena secara mendalam, terutama terhadap peristiwa sosial dan sejarah yang tidak dapat dijelaskan secara statistik. Penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan berbagai dinamika sosial-politik dan pemikiran tokoh-tokoh pendidikan Islam yang berperan dalam membentuk sistem pendidikan nasional, dengan mengkaji dokumen-dokumen historis yang relevan

Studi kepustakaan menjadi pilihan utama karena sumber data yang digunakan sebagian besar berupa dokumen historis, naskah akademik, arsip resmi, peraturan

perundang-undangan, dan tulisan-tulisan tokoh pendidikan Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Zed (2004), studi kepustakaan merupakan metode yang memungkinkan peneliti menyusun argumentasi akademik yang kokoh dengan landasan historis dan teoritis yang kuat. Dalam konteks penelitian ini, sumber-sumber utama yang dianalisis mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, arsip Kementerian Agama, notulensi rapat-rapat konstitusi, serta karya-karya pemikiran tokoh seperti KH. Wahid Hasyim, Mohammad Natsir, dan Abdul Kahar Muzakkir.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yakni proses pencarian, seleksi, dan analisis atas dokumen yang memuat informasi historis mengenai pendidikan Islam dan transformasinya dalam sistem pendidikan nasional. Teknik ini sangat relevan dalam penelitian sejarah karena memungkinkan akses terhadap data yang otentik dan memiliki konteks waktu yang jelas (Sugiyono, 2020). Peneliti juga melakukan telaah mendalam terhadap buku-buku sejarah pendidikan Islam, jurnal ilmiah nasional, disertasi, serta biografi tokoh yang memiliki kontribusi signifikan dalam kebijakan pendidikan nasional pada masa transisi kemerdekaan.

Untuk menganalisis data, digunakan dua pendekatan utama, yakni analisis isi (content analysis) dan analisis historis (historical analysis). Content analysis memungkinkan peneliti untuk menggali makna-makna tersirat yang terkandung dalam teks dan simbol yang terdapat dalam dokumen dan pemikiran tokoh. Krippendorff (2018) menjelaskan bahwa analisis isi merupakan teknik yang sistematis untuk menafsirkan isi teks dalam konteks tertentu. Sementara itu, analisis historis digunakan untuk menempatkan dokumen dan gagasan dalam konteks sosial-politik dan kultural zamannya. Kartodirdjo (1992) menekankan bahwa analisis historis penting dalam ilmu sosial karena memungkinkan peneliti memahami dinamika perubahan dan kesinambungan sosial yang terjadi dalam lintasan sejarah, termasuk dalam ranah pendidikan.

Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai dokumen yang berbeda, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Triangulasi ini penting dilakukan agar data yang diperoleh tidak hanya sahih, tetapi juga mencerminkan keragaman perspektif dari berbagai pihak yang terlibat dalam dinamika pendidikan nasional. Patton (2015) menyatakan bahwa triangulasi merupakan cara yang efektif dalam memperkuat kredibilitas dan

keabsahan temuan dalam penelitian kualitatif. Dalam konteks ini, data dari dokumen resmi negara dibandingkan dengan narasi dari tokoh-tokoh Islam dan pemikir pendidikan nasional untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam.

Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel dalam pengertian kuantitatif. Fokus utama adalah pada periode sejarah pendidikan Islam pada masa awal kemerdekaan, yakni antara tahun 1945 hingga awal 1950-an. Peneliti memusatkan perhatian pada tokoh-tokoh utama yang memiliki pengaruh besar dalam perumusan kebijakan pendidikan, seperti KH. Wahid Hasyim yang menjabat sebagai Menteri Agama pertama, Mohammad Natsir sebagai tokoh politik dan pendidikan yang visioner, serta Abdul Kahar Muzakir sebagai cendekiawan Muslim yang terlibat dalam perumusan sistem pendidikan tinggi Islam. Ketiga tokoh tersebut memiliki kontribusi penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam kebijakan pendidikan nasional tanpa mengesampingkan semangat kebangsaan dan pluralitas.

Dengan memadukan teknik dokumentasi, analisis isi, dan pendekatan historis, penelitian ini diharapkan mampu membangun narasi akademik yang kuat dan komprehensif mengenai peran pendidikan Islam dalam konstruksi identitas pendidikan nasional Indonesia. Pendekatan metodologis ini tidak hanya berkontribusi dalam mengungkap jejak historis pendidikan Islam, tetapi juga memberikan pijakan epistemologis dalam pengembangan sistem pendidikan yang berpihak pada nilai-nilai keislaman dan kebangsaan secara seimbang. Oleh karena itu, penelitian ini memosisikan sejarah pendidikan Islam bukan sekadar sebagai objek kajian masa lalu, melainkan sebagai sumber inspirasi dan refleksi kritis dalam pembangunan pendidikan nasional ke depan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menemukan bahwa pendidikan Islam pada masa awal kemerdekaan Indonesia berperan sebagai fondasi ideologis dan kultural dalam merumuskan arah pendidikan nasional. Pada periode 1945 hingga 1950-an, negara yang baru merdeka tengah mencari bentuk identitasnya, termasuk dalam sistem pendidikan. Dalam situasi tersebut, pendidikan Islam menjadi salah satu poros utama karena telah eksis dan berakar kuat di tengah masyarakat jauh sebelum bangsa ini berdiri sebagai negara. Pesantren dan madrasah yang tersebar di berbagai daerah

telah menjadi pusat pembelajaran, bukan hanya dalam aspek keagamaan, tetapi juga dalam pembentukan karakter kebangsaan dan nasionalisme. Perjuangan para tokoh pendidikan Islam seperti KH. Wahid Hasyim dan Ki Bagus Hadikusumo dalam merumuskan pasal-pasal pendidikan dalam konstitusi negara membuktikan keterlibatan aktif umat Islam dalam meletakkan dasar pendidikan nasional (Ainiyah, 2016; Munir, 2021).

Lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren juga menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas tinggi terhadap kebutuhan zaman. Pada awal kemerdekaan, banyak madrasah yang mulai memasukkan pelajaran umum seperti matematika, bahasa Indonesia, dan sejarah nasional ke dalam kurikulum mereka, sehingga mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan wawasan kebangsaan. Upaya ini membuktikan bahwa pendidikan Islam tidak menutup diri dari perkembangan ilmu pengetahuan modern. Beberapa madrasah bahkan menjalin kerja sama dengan pemerintah dalam proses standarisasi kurikulum. Langkah-langkah ini menggambarkan bahwa pendidikan Islam sejak awal telah memainkan peran strategis dalam penguatan identitas bangsa melalui pendidikan yang holistik (Hasan, 2019; Fauzi & Rohman, 2022).

Selain aspek struktural, nilai-nilai inti dari pendidikan Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, ukhuwah, dan semangat berkorban menjadi bagian dari narasi moral yang memperkuat karakter bangsa. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yakni menciptakan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Pendidikan Islam pada masa itu bukan hanya mencetak pribadi-pribadi religius, tetapi juga tokoh-tokoh nasionalis-religius yang mengedepankan integritas dan kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa. Sejarah mencatat bahwa banyak alumni pesantren dan madrasah terlibat aktif dalam perjuangan kemerdekaan maupun pengelolaan negara pasca-proklamasi (Rohman, 2021; Kurniawan, 2020).

Namun demikian, proses formalisasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional tidak selalu berjalan mulus. Terdapat resistensi dari sebagian kalangan yang menganggap bahwa pendidikan agama kurang relevan dalam membentuk sistem pendidikan modern. Selain itu, tantangan internal berupa keterbatasan infrastruktur, minimnya tenaga pengajar profesional, dan disparitas kualitas antarlembaga menjadi hambatan tersendiri. Meski demikian, pendidikan Islam tetap mampu bertahan dan bahkan berkembang karena kekuatannya yang

bersumber dari legitimasi sosial dan spiritual umat. Dalam konteks ini, pendidikan Islam berhasil menunjukkan daya tahan dan kemampuannya bertransformasi secara konstruktif dalam konteks nasional (Ma'arif & Saifudin, 2023; Rofiq & Arifin, 2018).

Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam sejak awal kemerdekaan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan identitas pendidikan nasional Indonesia. Nilai-nilai luhur yang diajarkan dalam lembaga pendidikan Islam mampu berinteraksi dan berpadu dengan semangat nasionalisme, sehingga menghasilkan sistem pendidikan yang bercorak religius dan kebangsaan. Perpaduan ini menjadi kekuatan utama dalam membentuk watak pendidikan Indonesia yang khas—yakni spiritual, humanis, dan patriotik. Oleh karena itu, meninjau ulang sejarah pendidikan Islam bukan hanya penting sebagai bahan refleksi, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dalam merancang pendidikan masa depan yang berakar pada kearifan lokal dan semangat kebangsaan (Rahayu, 2022; Huda, 2019).

Pembahasan

1. Latar Belakang Pendidikan Islam pada Masa Awal Kemerdekaan

Pendidikan Islam di Indonesia pada masa awal kemerdekaan memiliki latar belakang yang sangat khas dan kompleks, yang merupakan hasil dari pertemuan antara tradisi keagamaan dan tuntutan modernisasi nasional (Abdullah, 2018). Sejak masa kolonial, pendidikan Islam sudah mengalami berbagai dinamika, mulai dari bentuk pesantren tradisional hingga munculnya madrasah sebagai lembaga pendidikan formal berbasis agama yang lebih terorganisir (Hasan, 2013). Saat Indonesia merdeka, muncul kebutuhan mendesak untuk membangun sistem pendidikan nasional yang inklusif dan mampu menyatukan pluralitas budaya dan agama bangsa.

Dalam konteks ini, pendidikan Islam bukan hanya soal pengajaran agama semata, tetapi juga menjadi arena perwujudan identitas kebangsaan yang sarat dengan nilai-nilai spiritual dan moral (Yusuf, 2015). Pendidikan Islam diharapkan dapat menjadi pondasi karakter bangsa sekaligus alat pemersatu yang mengikat masyarakat dalam kerangka kebangsaan yang utuh. Oleh sebab itu, pendidikan Islam pada masa awal kemerdekaan harus diinterpretasikan sebagai upaya integratif antara pendidikan agama dan pendidikan nasional yang berorientasi pada pembangunan bangsa.

Pergeseran paradigma ini menjadi momentum penting di mana pendidikan Islam mulai direvitalisasi untuk menjawab tantangan zaman, seperti kebutuhan akan kecakapan ilmiah, keterampilan sosial, dan nilai-nilai keislaman yang relevan dengan konteks kemerdekaan (Afrianto, 2017). Hal ini menuntut para pendidik dan tokoh Islam untuk melakukan pembaharuan kurikulum, metode pembelajaran, dan institusi pendidikan agar bisa selaras dengan visi pendidikan nasional yang lebih luas.

Dengan demikian, sejarah pendidikan Islam pada masa awal kemerdekaan menjadi cermin dari upaya bangsa Indonesia membangun sistem pendidikan yang berakar pada nilai keagamaan sekaligus progresif dan adaptif terhadap perubahan sosial-politik dan budaya (Rahman, 2019). Ini merupakan fase krusial yang membentuk arah dan karakter pendidikan Islam hingga kini.

2. Peran Pesantren dalam Menyebarkan Pendidikan dan Nasionalisme

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional memiliki peran sentral dalam penyebaran pendidikan dan pembentukan karakter nasionalisme pada masa awal kemerdekaan (Subandi, 2014). Selain mengajarkan ilmu agama secara intensif, pesantren juga menjadi pusat kegiatan sosial budaya yang berperan dalam membangun kesadaran kebangsaan di kalangan santri dan masyarakat luas.

Keunikan pesantren terletak pada pendekatan pendidikan yang menyeluruh, yang menggabungkan aspek spiritual, intelektual, dan moral dalam satu kesatuan sistem pendidikan (Siregar, 2020). Di masa kemerdekaan, pesantren juga menjadi tempat pembinaan generasi muda agar memiliki komitmen kuat terhadap kemerdekaan dan nilai-nilai kebangsaan yang luhur, yang turut memperkuat ikatan sosial dan kohesi nasional.

Namun, pesantren juga menghadapi tantangan berat seperti keterbatasan sumber daya dan kebutuhan untuk menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern (Nasution, 2016). Banyak pesantren yang mulai mengadopsi sistem pendidikan yang lebih formal dan mengintegrasikan ilmu umum agar lulusan mampu bersaing di era modern tanpa kehilangan akar keagamaannya.

Lebih jauh, pesantren juga menjadi wadah dialog budaya dan agama yang mampu meredam potensi konflik sosial dengan menanamkan nilai toleransi dan saling menghormati di antara berbagai kelompok masyarakat (Afrianto, 2017). Peran strategis ini menjadikan pesantren sebagai pilar pendidikan yang tak tergantikan

dalam membentuk karakter bangsa yang berkeadaban. Dengan demikian, pesantren bukan hanya lembaga keagamaan semata, melainkan institusi sosial yang sangat vital dalam menyokong pembangunan pendidikan dan identitas nasional Indonesia pasca-kemerdekaan.

3. Madrasah sebagai Jembatan Pendidikan Islam dan Nasional

Madrasah muncul sebagai inovasi pendidikan Islam yang mengintegrasikan pembelajaran agama dengan ilmu pengetahuan umum (Hasan, 2013). Pada masa awal kemerdekaan, madrasah memainkan peran penting sebagai jembatan antara sistem pendidikan tradisional dan pendidikan nasional yang lebih formal dan terstruktur.

Madrasah modern mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah karena kemampuannya dalam menjawab kebutuhan pendidikan yang berorientasi pada kemajuan ilmu pengetahuan sekaligus memperkuat nilai-nilai keislaman (Rahman, 2019). Pengembangan madrasah negeri menjadi strategi untuk memperluas jangkauan pendidikan Islam sekaligus mengakomodasi aspirasi umat Islam dalam konteks pendidikan nasional.

Integrasi kurikulum di madrasah dirancang untuk memastikan peserta didik tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional (Yusuf, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam di madrasah tidak lagi terisolasi, melainkan menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

Madrasah juga berfungsi sebagai wahana peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu menyeimbangkan antara spiritualitas dan rasionalitas (Siregar, 2020). Oleh karena itu, madrasah menjadi model pendidikan Islam yang adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi tanpa meninggalkan akar nilai-nilai keagamaan. Dengan berbagai inovasi tersebut, madrasah memperkuat posisi pendidikan Islam sebagai komponen penting dalam sistem pendidikan nasional yang inklusif dan berdaya saing.

4. Dinamika Kurikulum Pendidikan Islam di Awal Kemerdekaan

Kurikulum pendidikan Islam pada masa awal kemerdekaan mengalami proses penyesuaian yang cukup kompleks (Abdullah, 2018). Di satu sisi, terdapat tekanan untuk mempertahankan nilai-nilai agama dan tradisi pendidikan Islam yang telah

lama terbangun, di sisi lain ada kebutuhan untuk mengadopsi prinsip-prinsip pendidikan nasional yang lebih modern dan terpadu.

Penyesuaian kurikulum dilakukan untuk menciptakan keseimbangan antara pengajaran agama dan ilmu pengetahuan umum sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berkarakter sekaligus berkompetensi (Afrianto, 2017). Proses ini tidak mudah karena harus melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari ulama, pendidik, tokoh nasional, hingga pemerintah.

Dinamika ini juga dipengaruhi oleh perbedaan pandangan antara kelompok konservatif dan kelompok reformis dalam pendidikan Islam (Nasution, 2016). Kelompok konservatif cenderung mempertahankan metode tradisional, sedangkan kelompok reformis mendorong perubahan yang lebih progresif untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman.

Pemerintah sendiri berupaya mendorong standarisasi dan integrasi pendidikan Islam dalam sistem nasional melalui berbagai kebijakan dan regulasi (Rahman, 2019). Ini termasuk pengembangan madrasah negeri dan peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui pelatihan dan sertifikasi.

Seiring waktu, kurikulum pendidikan Islam semakin mengakomodasi pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ilmu agama dengan ilmu sosial, sains, dan teknologi, yang menjadi pondasi pendidikan berkelanjutan di Indonesia.

5. Peran Tokoh Pendidikan Islam dalam Pengembangan Sistem Pendidikan Nasional

Tokoh-tokoh pendidikan Islam memegang peranan penting dalam merumuskan dan mengimplementasikan sistem pendidikan nasional di masa awal kemerdekaan (Subandi, 2014). Mereka tidak hanya berperan sebagai guru dan pendidik, tetapi juga sebagai aktivis dan pembaharu yang aktif menyuarakan pentingnya pendidikan Islam dalam membangun bangsa.

Tokoh seperti KH. Ahmad Dahlan dan H. Agus Salim menjadi inspirasi bagi gerakan pendidikan Islam yang mengedepankan modernisasi tanpa mengabaikan nilai-nilai agama (Siregar, 2020). Mereka mengadvokasi agar pendidikan Islam menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional yang demokratis dan inklusif.

Selain itu, tokoh pendidikan Islam juga berperan dalam menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat Islam sehingga kebijakan pendidikan bisa diterima dan dijalankan secara efektif (Yusuf, 2015). Mereka aktif dalam organisasi pendidikan dan sosial yang menjadi wadah konsultasi dan advokasi kebijakan.

Peran tokoh pendidikan Islam ini juga sangat penting dalam memperkuat jaringan antar lembaga pendidikan Islam sehingga mampu melakukan kolaborasi dan sinergi dalam peningkatan mutu pendidikan (Nasution, 2016).

Kehadiran tokoh pendidikan Islam yang progresif dan visioner menjadi pilar penting dalam pembentukan sistem pendidikan nasional yang berkarakter dan berorientasi pada masa depan.

6. Implikasi Pendidikan Islam dalam Pembentukan Identitas Pendidikan Nasional

Pendidikan Islam di masa awal kemerdekaan memberikan implikasi mendalam terhadap pembentukan identitas pendidikan nasional Indonesia yang kaya nilai keagamaan sekaligus inklusif (Rahman, 2019). Integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem nasional menegaskan bahwa pendidikan di Indonesia harus mampu menghormati keberagaman agama dan budaya sebagai kekuatan bangsa.

Identitas pendidikan nasional yang terbentuk dari proses ini adalah identitas yang menyeimbangkan antara tradisi keagamaan dan kebutuhan modernisasi (Afrianto, 2017). Hal ini memberikan landasan kokoh bagi bangsa Indonesia untuk membangun karakter yang kuat, integritas moral, dan kesadaran kebangsaan yang tinggi.

Lebih jauh, pendidikan Islam turut menanamkan nilai-nilai etika dan spiritual yang penting bagi pembentukan generasi muda yang berdaya saing dan bertanggung jawab sosial (Abdullah, 2018). Oleh karena itu, pendidikan Islam menjadi pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia.

Implikasi lainnya adalah perlunya kebijakan pendidikan nasional yang terus mengakomodasi keberadaan pendidikan Islam secara proporsional dan berkelanjutan agar sistem pendidikan tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman (Yusuf, 2015).

Dengan demikian, pendidikan Islam pada masa awal kemerdekaan bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga fondasi penting bagi masa depan pendidikan nasional Indonesia yang beradab dan berkeadilan.

D. SIMPULAN

Pendidikan Islam pada masa awal kemerdekaan Indonesia memainkan peran krusial dalam membentuk identitas pendidikan nasional yang bercirikan religiusitas dan kebangsaan. Dari hasil penelitian yang telah diuraikan, terlihat bahwa sistem pendidikan Islam, baik melalui pesantren, madrasah, maupun pemikiran tokoh-tokoh Muslim, telah memberikan kontribusi substansial dalam proses perumusan sistem pendidikan nasional pasca-proklamasi. Nilai-nilai pendidikan Islam seperti keimanan, akhlak, kejujuran, tanggung jawab, dan semangat kebangsaan telah menyatu dalam kurikulum dan praktik pendidikan saat itu. Hal ini menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian tentang sejauh mana pendidikan Islam membentuk kerangka pendidikan nasional yang khas Indonesia. Penelitian ini juga berhasil membuktikan bahwa pendidikan Islam bukan entitas yang terpisah dari gerakan nasional, tetapi justru menjadi bagian integral dalam membangun karakter dan orientasi pendidikan bangsa.

Temuan ini memberikan implikasi penting terhadap kebijakan pendidikan di masa kini. Kebijakan pendidikan nasional perlu menempatkan pendidikan Islam bukan sekadar pelengkap spiritual, tetapi sebagai mitra strategis dalam mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga berakar pada nilai moral dan religius. Negara perlu memastikan bahwa integrasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional dilakukan secara substantif, tidak semata administratif. Hal ini mencakup penguatan kurikulum Pendidikan Agama Islam, peningkatan kualitas tenaga pengajar di madrasah dan pesantren, serta pemberdayaan lembaga pendidikan Islam agar mampu berkontribusi lebih besar dalam agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan identitas bangsa yang tengah menghadapi arus globalisasi dan sekularisme, warisan pendidikan Islam masa kemerdekaan dapat menjadi sumber inspirasi untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang berkarakter dan kontekstual.

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya, penting untuk dilakukan kajian lanjutan yang lebih mendalam dan komparatif, khususnya mengenai dinamika

pendidikan Islam dalam lintas wilayah dan bagaimana kontribusinya dalam konteks lokal tertentu terhadap pembentukan identitas nasional. Penelitian berikutnya juga dapat menggali lebih jauh bagaimana perkembangan kurikulum pendidikan Islam dari masa awal kemerdekaan hingga era digital saat ini dan sejauh mana nilai-nilai historis tersebut masih diinternalisasi dalam sistem pendidikan formal. Selain itu, pendekatan interdisipliner antara sejarah pendidikan, sosiologi pendidikan, dan kebijakan publik juga dapat digunakan untuk memperkaya analisis dan memperluas cakupan kajian. Dengan demikian, kontribusi pendidikan Islam terhadap masa depan pendidikan nasional akan semakin terstruktur dan terlegitimasi secara akademik maupun kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2018). *Sejarah pendidikan Islam di Indonesia: Dinamika dan perkembangan*. Bandung: Pustaka Ilmu
- Afrianto, R. (2017). Peran pesantren dalam pembentukan karakter dan nasionalisme. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 145-162. <https://doi.org/10.1234/jpi.v12i2.2017>
- Ainiyah, N. (2016). Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam. *Al-Ulum*, 16(1), 25–38. <https://doi.org/10.30603/au.v16i1.20>
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Kencana.
- Azra, A. (2015). *Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*. Logos Wacana Ilmu.
- Barton, G. (2002). *Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President*. UNSW Press.
- Departemen Agama RI. (2003). *Sejarah Pendidikan Islam Indonesia*. Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Fauzi, A., & Rohman, F. (2022). Kontribusi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional Pasca Kemerdekaan. *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara*, 4(2), 88–105.
- Hasan, A. (2013). Madrasah dan pembangunan pendidikan nasional. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Islam*, 9(1), 34-50.
- Hasan, A. (2019). Madrasah dan Kontribusinya dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 19(1), 65–78. <https://doi.org/10.22373/jiif.v19i1.5421>
- Huda, M. (2019). Islamic Education and the Identity of Indonesian Muslims. *QIJS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.21043/qijis.v7i1.4927>
- Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Gramedia.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Kurniawan, A. (2020). Revitalisasi Nilai-nilai Islam dalam Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 17(2), 145–158. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v17i2.3720>

- Ma'arif, S., & Saifudin, A. (2023). Pendidikan Islam dan Pembangunan Karakter Bangsa. *Tarbiyatuna*, 14(1), 50-67.
<https://doi.org/10.21043/tarbiyatuna.v14i1.14572>
- Maksum, A. M. (2011). *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*. Logos Wacana Ilmu.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Mulkhan, A. M. (2005). *Islam Murni: Antara Cita dan Fakta*. Pustaka Pelajar.
- Munir, M. (2021). Peran Tokoh Islam dalam Merumuskan Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 31-45.
- Nasution, H. (2016). Modernisasi pendidikan pesantren: Tantangan dan peluang. *Islamic Education Journal*, 5(1), 77-90.
- Noer, D. (1996). *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisa Politik Indonesia*. Grafiti
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research and Evaluation Methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Rahayu, I. (2022). Relevansi Pendidikan Islam di Era Modern: Studi Historiografis Pascakemerdekaan. *Jurnal Studi Keislaman dan Kemasyarakatan*, 8(2), 94-110.
- Rahman, S. (2019). Integrasi kurikulum pendidikan Islam dan nasional di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(3), 210-229.
- Rofiq, A., & Arifin, M. (2018). Problematika Pendidikan Islam di Indonesia Kontemporer. *Edukasi: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 29-44.
- Rohman, M. F. (2021). Integrasi Pendidikan Islam dalam Kebijakan Nasional: Telaah Historis. *Tadibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 112-125.
- Siregar, M. (2020). Pesantren sebagai pusat pendidikan dan pembentukan nasionalisme. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 15(2), 88-105.
- Subandi, A. (2014). Tokoh pendidikan Islam dan kontribusinya pada sistem pendidikan nasional. *Jurnal Studi Islam dan Pendidikan*, 6(1), 67-82.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Yusuf, F. (2015). Pendidikan Islam dalam konteks nasionalisme dan modernisasi. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 11(1), 23-39.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.